

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Oleh karena itu pemerintah memberikan landasan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 17 tahun 2012 tentang koperasi yang menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha guna mewujudkan ekonomi kerakyatan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya.

Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta, hanya mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak koperasi. Para nasabah dalam hal ini peminjam dari Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dalam melakukan usahanya, tidak selamanya menguntungkan sering juga terjadi kerugian, sehingga dari faktor tersebut mereka tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada koperasi, sampai dengan jatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga dari sekian banyak peminjam yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo peminjam tersebut dapat melunasinya, akan tetapi karena sesuatu hal, peminjam tersebut tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah diperjanjikan pada awal peminjaman.

Kasus tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi dari nasabah terhadap koperasi, dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta yang bertindak sebagai kreditur. Dalam dunia perbankan, hal semacam ini dikenal dengan kredit tidak lancar atau kredit macet.

Namun untuk dapat dikatakan bahwa seseorang atau nasabah atau peminjam melakukan wanprestasi, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut lalai. Pernyataan tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan istilah somasi atau pernyataan dari koperasi atau kreditur kepada peminjam, yang berisi ketentuan bahwa koperasi menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata lain hutang itu harus ditagih terlebih dahulu.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta apabila nasabah wanprestasi adalah dengan mengedepankan azas kekeluargaan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (*resceduling*), mengubah persyaratan kredit (*reconditioning*) dan melakukan penataan kembali (*restucturing*).

Oleh karena itu guna mengantisipasi adanya wanprestasi, maka dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat diperlukan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur benar-benar melunasi utang. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar dari penuntutan adalah Pasal 1266 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 1267 KUHPerdata, yang berbunyi: "*Pihak yang terhadapnya*

perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara di atas, maka wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu guna mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur dalam perjanjian kredit, maka pihak kreditur dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta mensyaratkan adanya jaminan fidusia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sedangkan yang dimaksud fidusia dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Adapun sifat hukum dari fidusia sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat *accessoir* (tambahan) karena fidusia mengikuti perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu

utang-piutang. Pada jaminan fidusia, sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa fidusia lebih menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur juga masih dapat menguasai barangnya. Pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi yurisprudensi di Negara Belanda yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Jaminan fidusia ini merupakan perkembangan dari kebutuhan kredit dari masyarakat yang tidak tertampung pada lembaga jaminan yang ada pada waktu itu yaitu gadai dan hipotek (sekarang Hak Tanggungan). Karena pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia yang berdasarkan yurisprudensi dirasa kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, olehkarena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam lembaga fidusia, maka dikeluarkan UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia. Dan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Pasal 5 UU No.42 Tahun 1999.

Objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (4) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni benda. *Benda* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Dalam penjelasan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda

dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

Dalam Undang-Undang UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas dan menjamin kepastian terhadap kreditor lainnya. Namun tidak ditentukan lebih lanjut batasan waktu untuk pendaftaran jaminan fidusia. Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsure publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi

jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi sangat penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti Jaminan Fidusia misalnya. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit sebagai upaya pengamanan kredit, untuk lebih terjaminnya pelunasan utang debitur kepada pihak bank selaku kreditor. Pengikatan obyek jaminan kredit melalui lembaga jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dilakukan apabila obyek jaminan berupa benda bergerak. Namun berdasarkan pra penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, pembebanan jaminan fidusia masih terdapat permasalahan dan hambatan-hambatan yang perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis, seperti permasalahan eksekusi dari jaminan fidusia.

Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan seperti fidusia, namun dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit) biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, sehingga mengangkat judul: “Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Tentang Penyelesaian Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan akademik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang keperdataan dan jaminan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan sumber informasi serta dapat mengidentifikasi dan mengetahui hambatan-hambatan dan cara penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Manunggal Makmur Surakarta, serta untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Manunggal Makmur Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3.

asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan non-doktrinal dilaksanakan dengan tujuan mengkaji penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta. Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dijadikan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dipilih karena berdasarkan hasil pra survey peneliti menemukan adanya wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu

penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,² dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek masing).

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.³

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.⁴

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah : ketua koperasi, kepala bagian kredit serta pegawai bagian analisa kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta.

² Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

³ Sanapiyah Faisal, *Op. Cit*, hal 56.

⁴ *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snowballing*⁵ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.⁶

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.⁷

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

⁵ *Ibid*, hal 60

⁶ *Ibid*, hal 59-60

⁷ *Ibid*, hal 61

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Analisis data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis),

dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.⁸

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu :

Pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.⁹

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

⁸ Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

⁹ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia
 - 1. Pengertian Jaminan
 - 2. Pengertian Jaminan Fidusia
 - 3. Ciri-ciri Jaminan Fidusia
 - 4. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia
 - 5. Pembebanan Jaminan Fidusia
 - 6. Pendaftaran Jaminan Fidusia
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 2. Pengertian Kredit
 - 3. Unsur-unsur Kredit
 - 4. Tujuan dan Fungsi Kredit

5. Bentuk Perjanjian Kredit
 6. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku
 7. Isi Perjanjian Kredit
- C. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit
1. Pengertian Wanprestasi
 2. Macam-Macam Wanprestasi
 3. Sanksi Wanprestasi
 4. Ganti Rugi atas Pertanggungjawaban
- D. Tinjauan Tentang Koperasi
1. Pengertian Koperasi
 2. Pengaturan Koperasi Indonesia
 3. Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi
 4. Modal Koperasi
 5. Jenis-Jenis Koperasi

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Makmur Surakarta
- B. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta.
- C. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta.

- D. Hambatan-hambatan yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran